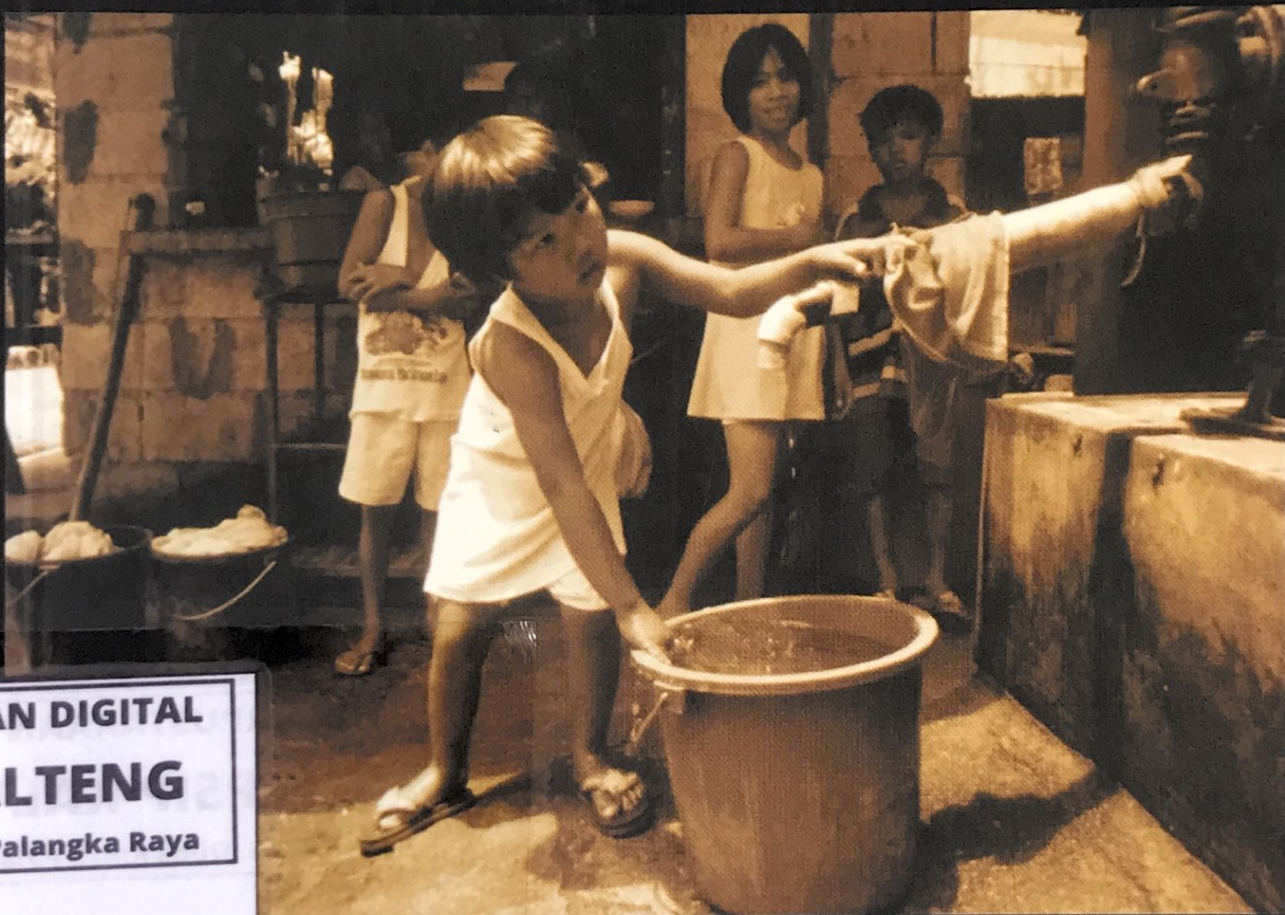




RECLAIMING PUBLIC WATER



AN DIGITAL
ALTENG
Palangka Raya

es, perjuangan dan visi dari berbagai negara



628.1

AND

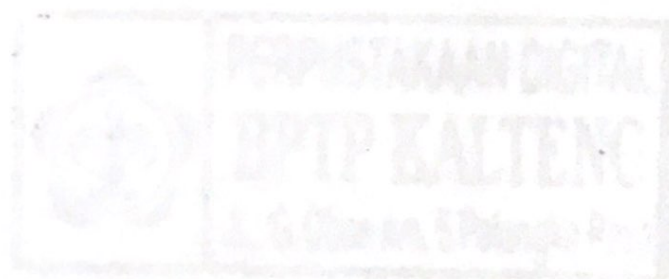
r

No. Induk	580/R/Ba4/11
Tgl. Terima	03/03/2011
Beli/Hadiah/Sumbangan	H
Nomor Buku	
Copy Ke	

RECLAIMING PUBLIC WATER

CERITA SUKSES, PERJUANGAN
DAN VISI DARI BERBAGAI NEGARA

CERITA SUKSES, PERJUANGAN
DAN VISI DARI BERBAGAI NEGARA



RECLAIMING PUBLIC WATER

**CERITA SUKSES, PERJUANGAN
DAN VISI DARI BERBAGAI NEGARA**



**AMRTA Institute
for Water Literacy**



RECLAIMING PUBLIC WATER

CERITA SUKSES, PERJUANGAN DAN VISI DARI BERBAGAI NEGARA

Tim Editorial:

Belen Balanya, Brid Brennan, Olivier Hoedeman,
Satoko Kishimoto, dan Phillipp Terhost

Edisi Bahasa Indonesia diterbitkan oleh:

Amrta Institute for Water Literacy

E-mail: amrta_institute@yahoo.com

Atas kerjasama dengan:

*Trans National Institute (TNI), dan
Corporate European Observatory (CEO)*

Penerjemah :

Nina Andiana, Triyogo Dwi Utami, Maria Octavia

Layout dan Desain Cover:

Zlatan Peric

Cetakan Pertama Edisi Bahasa Indonesia : Juli 2005

Cetakan Pertama Edisi Bahasa Inggris di Porto Alegre Brazil : Januari 2005

Cetakan Pertama Edisi Bahasa Inggris di Amsterdam Belanda : Maret 2005

ISBN : 979-99758-0-8

Isi Buku ini dapat dikutip atau direproduksi untuk tujuan-tujuan non-komersial, dengan penulisan sumbernya, TNI ingin mendapatkan salinan dokumen yang menggunakan atau mengutip buku ini

Dicetak oleh: Percetakan Bening Press Yogyakarta

Isi di luar tanggung jawab percetakan

UCAPAN TERIMA KASIH

Buku ini tidak akan terwujud tanpa kontribusi dari para penulis, sebuah kombinasi beragam dari para manajer utilitas air, profesional di bidang air, serikat pekerja, aktivis anti privatisasi, dan akademisi dari sekitar 20 negara. Kami berterima kasih kepada seluruh penulis yang telah menyediakan sebagian waktunya untuk berbagi pengalaman, meskipun dengan tekanan waktu dalam kampanye mereka maupun sebagai manajer yang bertanggung jawab mengelola utilitas air. Kami juga sangat berterima kasih kepada para penasehat untuk kontribusi mereka yang penting, yang telah berbagi keahlian dan membantu kami menemukan arah yang benar (David Hall, Clare Joy, Tim Kessler, Patrick Bond, Maj Fill-Flynn, Antonio Miranda, Carla Montemayor, Anil Naidoo, Pietje Vervest dan Alberto Villareal). Terima kasih kepada editor kami, Vicky Quinlan, yang telah merajut keberagaman ini menjadi koheren dan mudah dibaca. 11.11.11 (Belgia), Trécaire (Irlandia), dan Bread for the World (Jerman) yang telah memberikan dukungan finansial yang begitu penting bagi keberadaan buku ini.

**Brot
für die Welt**
www.brot-fuer-die-welt.de

11.11.11
JIJ VECHT TEGEN ONRECHT

TRÉCAIRE
Working for a Just World

MEMBELI AIR PADA SWASTA ASING

Oleh Nila Ardhianie

Selama ini kita kenal Mc Donalds, Reebok, Microsoft, Siemens, semuanya adalah merek-merek asing tapi terkenal di negara kita. Siapa pemilik merek-merek terkenal tersebut sebagian kita juga kenal, tapi bagaimana dengan Suez, Vivendi, RWE Thames Water, Biwater? Kata-kata itu masih terasa asing di telinga kita. Meski asing dan terkesan tidak menarik, sebaiknya mulai sekarang kita belajar mengenal lebih dalam tentang mereka, karena sebenarnya mereka sudah mulai ada di sekeliling kita dan dalam waktu tidak terlalu lama akan menancapkan kukunya erat-erat di sektor sumber daya air di Indonesia.

Ya, saat ini semua perusahaan besar dunia yang bergerak di sektor air telah beroperasi di Indonesia. Biwater di Batam dan Palembang; Odeco-Suez di Jakarta, Semarang, Medan dan Tangerang; RWE Thames Water di Jakarta dan Sidoarjo. Ketiga perusahaan ini bersama Vivendi yang juga beroperasi di Sidoarjo adalah tiga perusahaan air terbesar di dunia. Tanpa publikasi berlebihan, mereka telah dengan sukses memperoleh hak-hak pengelolaan maupun pembangunan fasilitas air di Indonesia.

Air adalah kebutuhan manusia yang sangat dasar, tanpa makan manusia dapat bertahan hidup selama lebih dari satu bulan, tapi tanpa air cuma 5-7 hari kita bisa bertahan. Melihat kenyataan tersebut tidak heran jika berbagai *Trans National Corporation* (TNC) atau perusahaan multi nasional berlomba-lomba mendapatkan konsesi puluhan tahun untuk pengelolaan air di Indonesia yang memiliki penduduk terbesar keempat di dunia. Di Jakarta, Odeco-Suez dan RWE Thames Water mendapat konsesi menyediakan air minum selama 25 tahun sejak 1997, Biwater di Batam juga mendapat kesempatan untuk menyediakan

air bersih selama 25 tahun dan sampai tahun ini sudah 78 % penduduk Batam yang dilayani perusahaan asal Inggris tersebut.

Pertanyaan yang paling mendasar dari kondisi yang tengah berkembang itu adalah: Apakah ini memang penyelesaian yang dikehendaki oleh sebagian besar masyarakat Indonesia atas permasalahan PAM/PDAM yang tidak bisa menyediakan air bersih yang berkualitas baik selama 24 jam sehari? Benarkah kita menginginkan perusahaan-perusahaan daerah yang jumlahnya sekitar 300 unit itu berganti kepemilikannya, dari pemerintah daerah ke swasta asing?

Lalu benarkah sekarang saat yang tepat untuk privatisasi? Meskipun air masuk dalam GATS (*General Agreement on Trade and Services*) —salah satu perjanjian di dalam World Trade Organization (WTO) yang mengatur mengenai liberalisasi perdagangan jasa— sehingga Indonesia yang merupakan anggota WTO wajib mengikuti aturan itu, tapi karena WTO baru berlaku 2020 maka selama 15 tahun ke depan bukan tidak mungkin jika dibenahi dengan benar PDAM kita juga bisa efisien sehingga pada saatnya nanti bisa bersaing. Bahkan bukan tak mungkin PDAM kita bisa memenangkan persaingan tersebut.

Tekanan bagi Indonesia untuk memprivatisasi sumber daya airnya saat ini memang sangat kuat contohnya. Asian Development Bank lewat proyek *Reform of Water Enterprises* memberikan pinjaman sebesar US\$ 600 ribu untuk membuat PDAM menjadi entitas bisnis yang mampu menarik investasi swasta. Dengan demikian yang terjadi adalah pemerintah mendorong agar PDAM menjadi efisien dan efektif dalam rangka membuka jalan bagi datangnya swasta —yang dalam kondisi ekonomi sulit sekarang ini hampir pasti yang dapat masuk adalah swasta asing— bukan membenahi PDAM untuk kepentingan kemandirian PDAM sendiri. Jelas bahwa preferensi tidak lagi diberikan kepada pemerintah untuk memperbaiki dan memperkuat pelayanan air

kepada publik tetapi kepada sektor swasta untuk mengambil alih peran sebagai penyedia jasa layanan publik ini.

Melakukan privatisasi sendiri saat ini jelas bukan pilihan tepat. Privatisasi yang secara sederhana dapat diartikan sebagai adanya transfer aset, operasi dan atau kepemilikan dari pemerintah kepada swasta membutuhkan berbagai syarat seperti adanya regulasi dan pelaksanaan yang disiplin serta kuatnya serikat pekerja dan berkembangnya organisasi-organisasi pelanggan. Dengan tumbuh dan kuatnya keempat elemen ini maka sektor swasta tidak dapat memiliki kekuatan mutlak atas sumber daya air.

Kuatnya masyarakat yang diwadahi dalam kelompok-kelompok pelanggan akan mampu membuat serikat pekerja tidak seenaknya melakukan *strike*, karena bagaimanapun hal ini akan mengganggu layanan kepada pelanggan. Sementara itu kuatnya serikat pekerja dan regulasi akan membuat perusahaan tidak memiliki dominasi. Kesemua elemen di atas sekarang relatif belum dimiliki negeri ini.

Pantas pula jika kita melihat pengalaman negara lain yang sumber daya airnya pun sudah diprivatisasi. Pada 1995 pemerintah Puerto Rico mengikat kontrak manajemen dengan Vivendi—perusahaan air terbesar di dunia—melalui anak perusahaannya Compania de Aguas. Empat tahun kemudian keluar laporan resmi dari “The Puerto Rico Office of the Contralor” yang mengatakan bahwa hasil dari kontrak ini hanyalah kekacauan belaka. Berbagai masalah dalam pemeliharaan, perbaikan fasilitas, pengoperasian dan administrasi dari saluran air terjadi terus menerus. Banyak pelanggan yang tidak puas karena keluhan mereka sering tidak dijawab bahkan ada konsumen yang meskipun tidak mendapat air tapi tetap harus membayar iuran penggunaan air. Secara keuangan negara ini pun dirugikan karena harus menyediakan subsidi akibat defisit operasional perusahaan yang terus meningkat sampai 241,1 juta dolar.

Cerita di Cochabamba lain lagi. Masyarakat di sana berhasil dengan gemilang mengagalkan kontrak dengan Aguas de Tunari sebuah anak perusahaan konsorsium International Water Ltd dan Bechtel Group. Pada tahun 1999 pemerintah Bolivia memberikan kontrak selama 40 tahun untuk mengoperasikan sistem keairan di Kota Cochabamba. Hanya beberapa minggu sejak perusahaan ini mulai beroperasi dan menaikkan tarif sampai 200-300 persen. Untuk menampung air hujan pun penduduk kota ini harus memiliki lisensi. Kemudian berbondong-bondonglah para buruh, petani, mahasiswa, guru, pensiunan yang tidak sanggup menanggung beban pembayaran yang sedemikian mahal itu mengadakan demo dan memblokade kota selama empat hari berturut-turut.

Hasil dari perjuangan rakyat Cochabamba yang kemudian dikenal dengan istilah "Water War" ini benar-benar memperlihatkan bahwa *people power* adalah kekuatan yang maha dasyat. Dengan bersatunya kekuatan sipil, perjanjian yang sudah dibuat pemerintah pun bisa dibatalkan.

Seperti di Indonesia privatisasi air di Bolivia pun dilakukan atas tekanan dari IMF dan World Bank. Dan dalam komentar langsung yang diberikan oleh Direktur Bank Dunia James Wolfenson, dikatakan bahwa negara seperti Bolivia harus memiliki *charging system* yang tepat. Dimana ini diterjemahkan menjadi membayar air sampai sebesar 20 dolar per bulan padahal pendapatan mereka saja hanya sekitar 100 dolar setiap bulannya. Artinya seperlima dari pendapatan bulanan masyarakat Cochabamba habis hanya untuk membayar air. Hal ini sangat kontras dengan jumlah yang harus dibayar oleh para pengambil keputusan di kantor pusat Bank Dunia yang banyak tinggal di pinggiran kota Washington DC yang makmur. Disana mereka hanya perlu membayar 17 dolar setiap bulannya untuk pelayanan air bersih padahal tidak sedikit dari mereka yang bisa memperoleh 100 dolar sehari.

Jika pemerintah di pusat neoliberalisasi saja menolak privatisasi air lalu kenapa negara dunia ketiga harus mau? Pertanyaan lain bagi kita semua: akan kah kita diam saja melihat sumber daya alam yaitu air dikelola oleh swasta asing yang jelas akan mengedepankan aspek ekonomi ketimbang aspek sosialnya.”

Nila Ardhianie, sejak 2005 bekerja pada Amrta Institute for Water Literacy dan anggota Dewan Pengarah Koalisi Rakyat Untuk Hak Atas Air.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

15

PENDAHULUAN

23

Oleh: David Hall

BAGIAN I PENGELOLAAN AIR PUBLIK YANG BERHASIL

AIR PORTO ALEGRE: PUBLIK DAN UNTUK SEMUA

37

Oleh: Helio Maltz

MANAJEMEN PELAYANAN AIR DAN SANITASI OLEH KOPERASI DI BOLIVIA

47

Oleh: Luis Fernando Yavari

INISIATIF MASYARAKAT DI SEKTOR AIR - DESA OLAVANNA DI KERALA, INDIA

57

Oleh: Joy Elamon

KEMITRAAN PUBLIK-PUBLIK: SEBUAH STRATEGI ALTERNATIF DALAM PENGELOLAAN AIR DI MALAYSIA

67

Oleh: Charles Santiago

KEMBALI KE ASAL - MENGEMBALIKAN PELAYANAN AIR KEPADA PUBLIK DI GRENOBLE, PERANCIS

75

Oleh: Raymond Avrillier

DEMOKRASI PERATURAN DAN PENGELOLAAN AIR DI AMERIKA SERIKAT

85

Oleh: Sean Flynn dan Kathryn Boudouris

JERMAN: PELAYANAN AIR PUBLIK TERUS-MENERUS MENGALAMI KEMUNDURAN?

99

Oleh: Hans-Werner Kruger

KOPERASI AIR DI ARGENTINA

109

Oleh: Alberto D. Munoz

PELAYANAN PUBLIK DI KOLOMBIA: SEBUAH MASALAH DEMOKRASI

117

Oleh: Hildebrando Velez

BAGIAN II AIR PUBLIK - DALAM PROSES PERKEMBANGAN

RECIFE, BRAZIL: MEMBANGUN LAYANAN AIR DAN SANITASI MELALUI KESADARAN BERWARGA NEGARA

129

Oleh: Antonio Miranda

COCHABAMBA, BOLIVIA: KEMITRAAN PUBLIK-KOLEKTIF SETELAH PERANG AIR

137

Oleh Luis Sánchez Gómez dan Philipo Terhorst

PENGALAMAN RAKYAT VENEZUELA DALAM MEMPERJUANGKAN LAYANAN AIR MINUM DAN SANITASI YANG BERPIHAK PADA MASYARAKAT	147
<i>Oleh: Santiago Arconada Rodríguez</i>	
MELAWAN ARUS: LAYANAN AIR BERBASIS KOMUNITAS DI SAVELUGU, GHANA	155
<i>Oleh: Al-hassan Adam</i>	
ARGENTINA: PASCA ENRON, KOPERASI PEKERJA MENGAMBIL ALIH	165
<i>Oleh: Guillermo Amorebieta</i>	
AFRIKA SELATAN: MENGUJI KEMITRAAN PUBLIK-PUBLIK	175
<i>Oleh: Laila Smith</i>	
 BAGIAN III PERJUANGAN UNTUK AIR PUBLIK	
URUGUAY: KEBERHASILAN PERJUANGAN SOSIAL UNTUK AIR	191
<i>Oleh: Carlos Santos dan Alberto Villareal</i>	
PERLAWANAN TERHADAP PRIVATISASI AIR DI AFRIKA SELATAN	199
<i>Oleh: Dale T. McKinley</i>	
UKRAINA: PERJUANGAN PEREMPUAN MELAWAN KEMISKINAN DAN PRIVATISASI	209
<i>Oleh: Svitlana Slesarenok</i>	
BELAJAR DARI PRIVATISASI PELAYANAN AIR DI TRENCIN, SLOVAKIA	221
<i>Oleh: Roman Havlicek</i>	
BEBERAPA KEMUNGKINAN UNTUK PENGELOLAAN AIR PUBLIK DI MANILA	235
<i>Oleh: Carla A. Montemayor</i>	
PRIVATISASI AIR DI INDONESIA	251
<i>Oleh: Nila Ardhianie</i>	
PENGELOLAAN AIR PERKOATAAN DI MEKSIKO	263
<i>Oleh: David Barkin</i>	
 MENUJU PEMBERDAYAAN AIR PUBLIK	271
<i>Oleh: Tim Editorial</i>	
TENTANG PENULIS	305
SUMBER-SUMBER	311